

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia karena kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus didukung dan di dorong kemampuannya agar tetap berkembang dan hidup, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (Anisah & Pujiati, 2018)

Terbukti pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Sejak terjadinya krisis ekonomi, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini, bertolak belakang dengan kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena UMKM mampu bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis ekonomi (Nurdwijayanti, 2018). Dikarenakan UMKM mengandalkan perputaran dana dengan modal yang relatif kecil sehingga lebih aktif membuat ide dan inovasi baru dalam usaha serta mampu meredam dampak krisis yang terjadi (Wicaksono, 2015).

Di berbagai Negara, UMKM juga dapat memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UMKM

di Negara maju rata-rata 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap dua pertiga tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas & Schrooten, 2006). Afrika selatan adalah salah satu Negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Dimana sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta dapat mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negaranya (Hutadjulu, 2016).

Pada tahun 2019, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlah tersebut meningkat 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 789,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara ada 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah (Kemenkop, 2019). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat tenaga kerja UMKM sebanyak 123,3 juta orang pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 2,30% dibandingkan pada tahun 2018 yang sebanyak 120,6 juta orang. Jumlah tersebut pun setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM telah menyumbangkan 5,72% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. (Kemenkop, 2019).

Sejak tahun 2015, Indonesia telah di hadapkan dengan Asean Ekonomi Community (AEC) dimana pada era ini persaingan di pasar akan semakin tinggi. Oleh karena itu para pelaku UMKM harus lebih berpikir secara kreatif dan inovatif supaya usahannya bisa permanen bertahan dan semakin

berkembang. Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat adanya masa pandemi covid-19 memberikan hal baru, terbukti setidaknya selama pandemi terjadi penjualan di e-commerce naik hingga 26% atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari (Kemenkop dan UKM, 2020). Dari banyaknya jumlah UMKM yang terdapat di Indonesia memberikan peran penting pada perekonomian nasional sebagai wadah lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Bertahannya UMKM terhadap krisis ekonomi dan UMKM sebagai peran penting untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan nilai ekspor, itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan pendanaan kepada para UMKM yang dikenal sebagai program pembiayaan UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan membantu UMKM untuk meningkatkan usahanya. Namun, kenyataan di lapangan mengatakan bahwa realisasi KUR tidak stabil dengan target. Tercatat pada tahun 2020, realisasi penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 76,33 triliun. Dimana 40,17% terealisasi dari target 190 triliun dengan jumlah total 2.873.929 juta debitur (Kemenko, 2020). Sedangkan pada bulan april tahun 2021, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat 88 triliun. Hanya sebesar 34,82% yang terealisasi dari target 253 triliun dengan jumlah 2.404.549 debitur (Kemenko, 2021). Selain pada kondisi perekonomian, faktor dari para pelaku usaha di duga juga masih menghambat tidak tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat

(KUR) dari tahun ke tahun. Mengakses pinjaman dari bank ialah salah satu cara untuk pengembangan operasional Usaha Mikro Kecil Menengah (Ploypailin, 2021).

Menurut (Hutadjulu, 2016) mengatakan bahwa belum adanya kesamaan pola pikir antara persyaratan perbankan yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk tidak tersediannya laporan keuangan merupakan penyebab minimnya akses keuangan UMKM. Padahal penting adanya laporan keuangan untuk memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis (Risa, Renny et al., 2019). Namun, masih minimnya penilaian para pelaku UMKM jika proses akuntansi itu tidak penting untuk di jalankan. Sehingga para pelaku usaha mengelola laporan keuangan terkesan mencatat apa adanya, yang belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan masih hanya sekedar mencatat keluar dan masuk kas (Kessek et al., 2021). Dimana hal tersebut menyulitkan untuk mengontrol informasi akuntansinya. Sehingga hal ini akan berdampak pada keberhasilan usaha karena tidak mengetahui asset yang dimiliki, serta kemungkinan resiko kecurangan dalam operasional yang dilakukan oleh karyawan yang tidak diketahui oleh pemilik usaha. Karena dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha, aspek pengelolaan keuangan menentukan berhasil atau tidaknya dalam membangun usaha, selain itu aspek modal dan pengelolaan dana yang dimiliki serta pemasaran. Penting bagi para pelaku UMKM untuk menerapkannya. Agar dapat mempermudah bagi pengguna dalam membaca laporan keuangan serta bijaksana dalam pengambilan keputusan bisnis secara

kongkret terkait pengembangan usaha yang dijalankan (Hanifah & Agustina, 2021). Karena, jika laporan keuangan tidak terarah kemungkinan penetapan strategis bisnis menjadi tidak terarah pula. Sehingga perkembangan usaha guna mendapat target pasar yang luas serta usaha tidak bisa bertumbuh secara baik dan dapat mengalami gulung tikar.

(Ketut et al., 2018) mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program permodalan yang bisa diperoleh melalui bank guna membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya, namun saat ini masih terdapat pelaku UMKM yang hanya mengandalkan dana dari modal pribadi dalam mengembangkan usahanya tanpa program yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut. UMKM juga beralasan bahwa skala usaha yang tengah dijalankan masih tergolong dalam usaha kecil dan juga umur yang masih tergolong usaha baru dalam kisaran 1-3 tahun. Selain itu juga, UMKM beralasan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dana secara kredit oleh pihak bank, karena penilaian pihak perbankan juga mempengaruhi dalam laporan keuangan yang berkualitas. Namun, para pelaku UMKM masih banyak yang tidak melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, laporan sesuai SAK yang berlaku merupakan salah satu syarat yang diharuskan oleh pihak kreditur (perbankan). Dari hal tersebut pihak kreditur dapat memperkirakan layak atau tidak untuk memperoleh pinjaman modal (Kessek et al., 2021).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya, UMKM seringkali

menghadapi masalah atau hambatan pada pendanaan. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, jaringan usaha, teknologi manajemen dan pemodalan. (Adryant and Rita dalam Sukirman & Gunawan, 2020). Banyaknya pelaku UMKM, yang belum dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar membuat para pihak kreditur enggan memberikan pinjaman modal karena tidak mengetahui posisi laporan keuangannya (Elyana, 2016). Serta hal yang kemungkinan terjadi disebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran bunga (Ploypailin, 2021). Rendahnya tingkat kualitas laporan keuangan pelaku UMKM disebabkan tidak ada pemisahan antara aset pribadi dengan usaha, serta prosedur yang rumit mengakibatkan sedikitnya UMKM yang mendapatkan kredit dari bank (Purwanti, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, Ikatan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang bertepatan pada 24 Oktober 2016 telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang di peruntukkan khusus bagi UMKM dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2018. Dalam penyusunan SAK EMKM ini para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan. Agar pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. Sehingga dengan mudah menyajikan laporan keuangan yang menjadi salah satu syarat kredit pada perbankan. SAK EMKM ialah suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana

dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknis, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (Anisah & Pujiati, 2018). Meskipun SAK EMKM terbilang sederhana, penyajian laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal. Namun, SAK EMKM tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM, masih banyak pelaku UMKM yang tidak menerapkan pembukuan yang sesuai dengan standar (Anisykurlillah & Rezqika, 2019).

Menurut informasi yang di kutip dalam suaramerdeka.com pada 5 April 2022 selaras dengan yang dikutip oleh kumparan.com pada 13 Juni 2017 yang berkaitan perihal penyusunan laporan keuangan sesuai standar masih minim. Serta informasi yang di kutip dalam okezone.com pada 23 Mei 2017 selaras dengan yang dikutip oleh kanalsatu.com pada 24 Mei 2017 kendala bagi UMKM yaitu sulitnya mendapat akses perkreditan. Hal ini disebabkan karena ribuan pelaku UMKM dianggap tidak *bankable* dikarenakan masih buta akan laporan keuangan. Banyak diantara para pelaku UMKM yang membuat laporan keuangan bercampur dengan keuangan pribadinya, bahkan ada juga UMKM yang sama sekali tidak memiliki laporan keuangan. Baru sedikit bahkan tidak mencapai 10% para pelaku UMKM yang memahami maupun yang memiliki laporan keuangan. Informasi yang selaras juga dikutip oleh kompas.com pada 30 Agustus 2018 yang mengatakan bahwa pelaku UMKM masih banyak belum menyadari akan pentingnya pencatatan dan juga pembukuan. Bahkan sebagian besar para UMKM buta akuntansi di era digital

sekarang ini. Tribunjogja.com pada 25 Oktober 2017 selama ini para UMKM memang sudah melakukan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada usaha mereka. Namun, untuk melakukan pembuatan laporan keuangan secara rinci, pelaku UMKM masih merasa kesulitan.

Pada penelitian (Anisykurlillah & Rezqika, 2019) mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak UMKM yang belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi, sehingga SAK EMKM yang dimana sebagai pedoman standar akuntansi UMKM belum bisa diterapkan karena UMKM belum paham terkait Standar Akuntansi Keuangan (SAK) itu sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan harapan bahwa adanya SAK EMKM semestinya dapat menjadi pedoman dalam pengetahuan tentang laporan keuangan bagi UMKM, oleh sebab itu perlu adanya informasi dan sosialisasi yang intens dari pihak pemerintah terhadap UMKM, mengingat jumlah pertumbuhan UMKM yang sangat tinggi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Kecamatan Jombang, pelaku usaha mengatakan bahwa mereka masih tidak paham dan menguasai. Adanya persepsi bahwa akuntansi sulit dan rumit untuk dilakukan sehingga tidak ada pemisahan dana pribadi dengan dana yang digunakan dalam usahanya. Sebagian kecil mengatakan bahwa mereka tidak memahami isi dari SAK EMKM. Pengusaha kecil berasumsi bahwa informasi keuangan tidak penting. Karena membutuhkan waktu dan biaya serta sulit untuk diterapkan. Hal yang paling penting bagi para pelaku usaha kecil adalah bagaimana menghasilkan laba banyak tanpa rumit menerapkan

akuntansi (Priyadi, 2017). Bagi skala usaha yang kecil beranggapan tidak membutuhkan laporan keuangan sehingga pelaku usaha tidak mencatat transaksi keuangan, pembukuan dan sebagainya melakukan perhitungan transaksi tanpa membuat laporan keuangan, yang terpenting bagi pelaku usaha yaitu mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan.

Tingkat Pendidikan menurut UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenjang pendidikan terakhir pengusaha seperti lulusan pendidikan SMA, SMK, S1 biasanya mempengaruhi pemahaman tentang pelaporan keuangan yang berstandar akuntansi (Anisykurlillah & Rezqika, 2019). Hasil penelitian (Adino, 2019) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Berbeda dengan hasil penelitian (Budiman et al., 2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Umur usaha adalah banyaknya waktu yang ditempuh oleh usaha dalam menjalankan usahanya untuk menunjukkan kemampuan bersaingnya (Elyana, 2016). Pengelolaan dan pembukuan yang baik akan meningkatkan

umur usaha. Dimana eksistensi usaha terjaga karena pemilik usaha dapat mengerti akan pencatatan untuk mengembangkan usaha guna mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan (Priyadi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Sholeh et al., 2020) dan (Andayani et al., 2021) menyatakan bahwa lamanya usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian (Mardiana et al., 2021) menyatakan bahwa lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap pengaruh pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Sosialisasi yang baik dapat membantu pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Oleh karena itu mengikuti sosialisasi SAK EMKM adalah cara untuk memperkenalkan dan membantu UMKM dalam mengetahui serta memahami SAK EMKM (Adryant and Rita dalam Sukirman & Gunawan, 2020). Diharapkan dengan adanya sosialisasi pencatatan akuntansi dan pemahaman tentang SAK EMKM, dapat memberi dorongan UMKM dalam membuat laporan keuangan yang baik. Setiap usaha perlu adanya laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian (Syukrina & Janrosi, 2018) ,(Adino, 2019) memberikan hasil bahwa sosialisasi juga berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UKM terhadap SAK EMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Budiman et al.,

2017) menyimpulkan bahwa pemberian sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total asset, jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi (Priyadi, 2017). Skala usaha dapat mempengaruhi tingginya tingkat transaksi yang dapat mendorong seseorang berfikir terkait solusi yang dihadapi. Hasil penelitian (Sholeh et al., 2020) dan (Andayani et al., 2021) menemukan bahwa skala usaha memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan dalam penelitian (Mardiana et al., 2021) skala usaha tidak berpengaruh positif terhadap pengaruh UMKM terhadap SAK EMKM.

Pengelolaan laporan keuangan masih mengalami masalah pada sebagian UMKM di Kecamatan Jombang. Karena para pelaku usaha berfikir bahwa itu sulit dan perlu adanya pelatihan intens dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Hal tersebut disebabkan berbagai banyak faktor yaitu, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan informasi akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK EMKM bagi pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan

laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2021) yang berjudul pengaruh kualitas sumber daya manusia, ukuran usaha dan lama usaha terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2021) yaitu terletak pada variabel bebas, dan objek yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas tingkat pendidikan, umur usaha, sosialisasi SAK EMKM, dan skala usaha. Sedangkan variabel terikatnya masih sama yaitu pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang digunakan yaitu pada UMKM di Kecamatan Jombang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur Usaha, Sosialisasi SAK EMKM, Dan Skala Usaha Terhadap Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pelaku UMKM Di Kecamatan Jombang”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan latar belakang masalah sebelumnya, diantaranya:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang?
2. Apakah umur usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang?
3. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang?
4. Apakah skala usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang.
2. Untuk mendapatkan bukti bahwa umur usaha berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang.

3. Untuk mendapatkan bukti bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang.
4. Untuk mendapatkan bukti bahwa skala usaha berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pelaku UMKM di Kecamatan Jombang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal tersediannya bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM dan juga diharapkan dapat menambah kepustakaan.

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai pengembangan serta referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berminat untuk mengkaji pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan UMKM

berdasarkan SAK EMKM.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi UMKM**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bahan masukan untuk mengetahui manfaat penerapan akuntansi pada UMKM, dan mempermudah para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM serta memahami akan pentingnya pembukuan sesuai dengan SAK EMKM untuk pengembangan usahanya.

##### **b. Bagi Pihak Menaungi UMKM**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Koperasi dan UM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menaungi UMKM di Kabupaten Jombang untuk mengintensifkan dan lebih menyeluruh dalam menyelenggaraan sosialisasi mengenai pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM guna meningkatkan pemahaman mengenai pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

#### **1.5. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan maret hingga bulan agustus 2022. Berikut skema waktu penelitian yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Bulan					
		Maret	Apri	Me	Jun	Jul	Agustu
1	Tahap Persiapan penelitian						
	a) Pengajuan Judul						
	b) Studi literatur						
	c) Perizinan Penelitian						
	d) Penyusunan Proposal						
2	Tahap Pelaksanaan						
	a) Pengumpulan Data						
	b) Pengolahan dan Analisis Data						
3	Tahap Penyusunan Laporan Penelitian						

Sumber : Data diolah peneliti, 2022